

Haluan











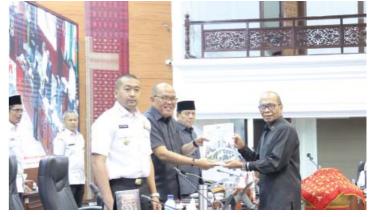




Rapat kerja Bapemperda DPRD Sumbar



Peringatan Hari Jadi Sumbar ke-78 di DPRD Sumbar



Rapat Paripurna yang digelar oleh DPRD Sumbar

## BANYAK PENCAPAIAN DAN PRESTASI DITOREHKAN

## Kinerja DPRD Sumbar Tahun 2023 Meningkat

Sepanjang tahun 2023, banyak pencapaian dan prestasi telah berhasil ditorehkan oleh DPRD Sumbar terkait pelaksanaan kinerja. Hal ini terungkap saat jumpa pers ekspos kinerja DPRD Sumbar Tahun 2023 yang disampaikan oleh Ketua DPRD Sumbar, Supardi, Senin (18/12) di Gedung DPRD.

Ikut mendampingi dalam jumpa pers tersebut Ketua Komisi III DPRD Sumbar Ali Tanjung, Sekretaris DPRD Sumbar Raflis, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Zardi Syahrir, dan Kasubag Humas dan Protokoler Sekretariat DPRD Sumbar, Dahrul Idris.

Supardi memaparkan, terkait pelaksanaan fungsi legislasi, dari 5 ranperda yang menjadi inisiatif DPRD Sumbar pada tahun 2023, sebanyak 4 perda telah berhasil disahkan. Satu ranperda lagi diluncurkan untuk dilanjutkan pembahasannya pada 2024.

Jumlah perda inisiatif yang disahkan DPRD Sumbar tahun 2023 meningkat dibanding tahun 2022 lalu yang hanya 2 perda inisiatif. Tak hanya melahirkan regulasi sesuai kebutuhan daerah dan masyarakat, 65 anggota DPRD Sumbar juga aktif menyosialisasikan perda-perda yang telah dilahirkan ke tengah-tengah masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.

Untuk fungsi penganggaran, juga telah dijalankan dengan maksimal. Mengenal hal ini DPRD Sumbar telah berhasil mempercepat pengesahan AP-BD 2024 yang ketuk palu pada pertengahan November lalu, sehingga serapan anggaran tahun 2024 juga bisa dipercepat.

cepat.
"Dari sisi pengawasan kita terus memonitoring kinerja Pemprov. Alhamdulillah belum lama ini kita baru saja menyelesaikan fungsi pengawasan terkait kerja sama Novotel, persoalan konflik agraria Air

Bangis, dan kemarin kita baru saja melakukan pembahasan RTRW dengan mengundang teman-teman Walhi dan LBH Padang," tukasnya.

Kemudian, sambung Supardi, selama Tahun 2023 telah dilaksanakan rapat-rapat dan diskusi sebanyak 332 kali. Jika dibandingkan dengan tahun 20-22 hal ini mengalami kenaikan signifikan sekitar 20 persen. Rapat-rapat yang diadakan itu diantaranya, rapat paripurna, rapat pimpinan, rapat kerja, seminar, dan beberapa yang

Mengenai sarana prasarana penunjang publikasi kegiatan kedewanan, DPRD Sumbar memiliki website pemberitaan yang dibuat bekerjasama dengan diskominfo, ada videotrone outdoor dan indoor, majalah DPRD, dan juga medsos yang lengkap meliputi IG, Facebook, Twitter, TikTok, Youtube, dan Podcast. Selain itu juga dijalankan juga kerja sama dengan media cetak dan juga

"Produktivitas postingan medsos cukup giat kita lakukan, karena memang salah satu penyambung lidah DPRD dalam menyampaikan informasi ke publik atas kinerja yang telah dijalankan adalah melalui media sosial," ucapnya.

Supardi mengatakan, atas gencarnya publikasi yang dijalankan, saat ini DPRD Sumbar menempati peringkat II sebaran pemberitaan secara nasional, mengungguli Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat yang berada di peringkat III dan IV.



Ketua DPRD Sumbar, Supardi (dua dari kiri) dan Sekretaris DPRD Sumbar Raflis (pertama dari kiri) saat kunjungan ke Perpusnas

"Data ini merupakan hasil survei yang dilakukan lembaga Indonesia Indikator, yang menempatkan DKI Jakarta sebagai pemuncaknya," ucapnya.

Diungkapkan Supardi, sebaran pemberitaan secara nasional DPRD DKI Jakarta sebanyak 33.392, DPRD Sumbar (15.091), DPRD Jawa Timur (13.937) dan DPRD Jawa Barat (12.228).

Adapun untuk mendukung kemajuan literasi Sumatera Barat, disampaikannya, DPRD Sumbar melahirkan sejumlah inovasi diantaranya pojok baca digital (pocadi). Kemudian ada kerja sama perpustakaan digital dengan Perpusnas yang sekarang tengah dalam proses. Untuk ini, DPRD Sumbar adalah satu-satunya DPRD di Indonesia yang memulai kerja

sama dengan Perpusnas. Mengenai sumber daya manusia (SDM), DPRD Sumbar memiliki sebanyak 253 orang. Mereka ada yang berstatus ASN, honorer dan tenaga outsourcing/kontrak. Ditegaskan Supardi, meski tidak memiliki OPD-OPD seperti Pemprov, dan dengan keterbatasan SDM yang ada, DPRD Sumbar terus berupaya agar pelaksanaan tupoksi berjalan dengan maksimal.

maksımal.
Ketua Komisi III DPRD Sumbar Ali Tanjung menambahkan, terkait tupoksi Komisi III, selain telah memberikan rekomendasi terkait kerja sama pengelolaan Novotel, sejumlah hal juga telah dijalankan sehubungan pengoptimalan pengelolaan aset dan upaya peningkatan pendapatan daerah. Diantaranya memberikan rekomendasi terkait pengelolaan GOR Agus Salim, yang mana untuk persoalan ini

diminta pada Pemprov untuk melakukan kontrak ulang mengikuti appraisal independen, atau Pergub tentang tarif sewa. Sehingga bisa didapat pendapatan daerah yang lebih besar dari sekarang yang hanya Rp200 juta pertahun.

"Kita juga minta Pemprov supaya segera mengevaluasi dan merevisi semua kontrak kerja sama yang dilakukan dengan pihak lain. Karena Pergub tentang tarif sewa sekarang sudah ada," ucap Ali Tanjung.

Adapun tentang rencana pendapatan tahun 2024, terang dia, Komisi III fokus dalam menggenjot pajak kendaraan bermotor. Setiap Samsat cabang akan diminta menaikan target pendapatan. Sebab, sejauh ini target yang ditetapkan Samsat cabang dinilai masih jauh dari potensi yang ada. Potensi besar, sementara target

yang ditetapkan masih rendah. Sementara itu, Sekretaris DPRD Sumbar, Raflis menyampaikan, Sekretariat DPRD Sumbar sebagai yang bertugas memfasilitasi kegiatan kedewanan terus berbenah, melakukan banyak inovasi, dan mengoptimalkan keterbukaan informasi sesuai amanah *Undang-Undang* No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Atas berbagai inovasi yang dilahirkan dan keterbukaan informasi yang terus dikedepankan, selama empat tahun belakangan secara berturut Sekretariat DPRD Sumbar telah berhasil meraih predikat informatif dari KI Sumbar.

"Tagline kita adalah, dengan keterbukaan informasi publik kita wujudkan DPRD Sumbar yang dicintai oleh publik," tukas Raflis. (adv)



Jumpa pers ekspos akhir tahun pelaksanaan kinerja DPRD Sumbar yang disampaikan oleh Ketua DPRD Sumbar, Supardi



Rapat Badan Musyawarah DPRD Sumbar



Rapat kerja Komisi I DPRD Sumbar



Rapat Kerja Komisi III DPRD Sumbar



Rapat kerja Komisi IV DPRD Sumbar



Rapat Kerja Komisi V DPRD Sumbar